

NASKAH AKADEMIK

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

URGENSI PENGANCAMAN PIDANA KURUNGAN UNTUK MENANGGULANGI

PENGEMISAN DI MUKA UMUM



Disusun oleh :

HENDRA BUANA WAHYUADI

NPM : 090510033

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian sengketa
hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH AKADEMIK

**URGENSI PENGANCAMAN PIDANA KURUNGAN UNTUK MENANGGULANGI
PENGEMISAN DI MUKA UMUM**

Diajukan oleh :

HENDRA BUANA WAHYUADI

NPM : 090510033

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian sengketa
hukum**

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 19 Mei 2014

Dosen Pembimbing



Dr. G. WIDIARTANA, S.H., M.Hum.

URGENSI PENGANCAMAN PIDANA KURUNGAN UNTUK MENANGGULANGI PENGEMISAN DI MUKA UMUM

Abstract

Legal writing is titled on the criminal threats urgency to tackle begging in public in order to create public order and comfort of the community in social life. The formulation of the issues raised was whether the urgency of the criminal threats against begging in public. Knowing which aims to analyze the urgency of threats and criminal confinement against begging in public so as to know the usefulness of the criminal threats to the application of the law against perpetrators of begging. Are expected to be useful knowledge for the development of law in general and the development of the science of criminal law in particular as well as additional knowledge and insight for writers on criminal law, as well as provide knowledge to the public in order to raise awareness and concern to always obey the rules and the Law apply. The conclusion that can be drawn Urgency confinement threats against begging in public is to prevent and show that the act was reprehensible and should not be done. It aims to create comfort, order and security of the city, due to the presence of the beggars that live very disturbed public order or traffic order so make a lot of other people became restless.

Keywords: Urgency, criminal threats, begging In public, criminal theats.

Abstraksi

Penulisan hukum ini berjudul tentang urgensi pengancaman pidana kurungan untuk menanggulangi pengemis di muka umum dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat dalam berkehidupan social. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah apakah urgensi pengancaman pidana kurungan terhadap pengemis di muka umum. Yang bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis urgensi pengancaman pidana kurungan terhadap pengemis di muka umum sehingga dapat diketahui kegunaan pengancaman pidana kurungan untuk penerapan hukum terhadap pelaku pengemis. Yang diharapkan dapat bermanfaat pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya dan juga sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk selalu mentaati peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik Urgensi pengancaman pidana kurungan terhadap pengemis di muka umum adalah untuk mencegah dan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela dan tidak boleh dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan kota, karena keberadaan dari pada pengemis itu secara langsung sangat mengganggu ketertiban umum ataupun ketertiban lalu lintas sehingga membuat banyak masyarakat lainnya menjadi resah.

Kata kunci : Urgensi, Pengancaman pidana, Pengemis Dimuka umum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya.

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*), itulah konsep negara yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana pernyataan Jimly Ashiddiq, sebagai berikut:

“Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya, karena itulah konsep negara yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesejahteraan, namun berbagai masalah pendidikan, kesehatan, pendidikan rasa aman dan kesejahteraan umum belum terselesaikan dengan baik, artinya cita-cita nasional seperti yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

1945, dan implementasi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 belum berhasil dicapai dengan baik.¹

Negara kesejahteraan sejatinya adalah strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial terencana, melembaga dan berkesinambungan. Bentuk perlindungan negara mencakup jaminan sosial dasar yang melindungi warga negaranya dari resiko kehilangan pendapatan karena sakit, kematian, mengangur, kecelakaan kerja dan kehamilan.²

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pengemis di muka umum, Pasal 504 KUHP menentukan sebagai berikut :

1. Barang siapa mengemis dimuka umum, diancam kerana melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pengemisian dapat mengganggu orang yang sedang berpergian, dianggap kurang pantas dan amat memalukan, akan tetapi jika datang meminta-minta di rumah, tidak dikenakan pasal ini ,asal tidak kelihatan di jalan umum.³R. Soesilo mendefisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalamkatagori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi main gitar, biola, angklung, musik serta menyodorkan permainan sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang bisa dilakukan

¹Emir Soendoro, *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Brdikari*, (jakarta: Dinov Progress Indonesia, 2009), halaman. 35

²*Ibid*, hlm. 36

³ R.Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung:Karya Nusantara,1988)hlm.327

dikota-kota besar.⁴ Dalam pengertian lain pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.⁵

Bertitik tolak dari pengertian tersebut diatas, maka definisi pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasih dari orang. Cara yang dimaksud adalah dengan mengamen atau meminta sumbangan yang disertai dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa atau camat yang memuat keterangan bahwa yang bersangkutan fakir miskin atau anak yatim.

Operasional hukum selain berpijak pada dasar negara, yaitu pancasila, juga harus berpijak pada empat prinsip cita-cita hukum, yakni: ⁶

1. Melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan.
2. Mewujudkan keadilan sosial di bidang ekonomi dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum.
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadilan dalam hidup beragama.

Tertib hukum akan terganggu akibat adanya kejahatan dan pelanggaran hukum. Perkembangan hukum itu sendiri makin lama akan ketinggalan, karena kemampuannya dalam merumuskan hukum maupun pelaksanaannya akibat kondisi masyarakat yang majemuk yang semakin kompleks. Pada gilirannya pertentangan

⁴ Ibid, hlm. 327

⁵ <http://dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html>.

⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm 18.

kepentingan hidup dalam masyarakat dan akhirnya muncul perlawanan hukum itu yang dapat menimbulkan masalah sosial.⁷

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah urgensi pengancaman pidana kurungan terhadap pengemisan di muka umum?

⁷ Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 12

BAB II

KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP PENGEMISAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Kurungan

Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu harus ada kepastian hukum terhadap suatu tindak pidana. Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkannya pada suatu tempat tertentu (LP/Rutan) dengan peraturan dan tata tertib tertentu. Adapun dimaksud dengan pidana kurungan (pengertian) ialah : Pidana kurungan ada suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan dijatuhkan serendah-rendahnya 1 hari dan paling lama 1 tahun dan dapat ditambah lagi 4 bulan apabila ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan (residivis). Menurut Remmelink, pada awalnya pidana kurungan dimaksudkan sebagai *custodia honesta*, yaitu yang diancamkan terhadap tindak pidana yang tidak terkait dengan kesalahan moril, namun yang terkait dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan yang tidak menghilangkan martabat pelaku sebagai orang bermoral.

Hak-hak yang dimiliki oleh mereka yang dijatuhi hukuman pidana kurungan juga berbeda dibandingkan dengan yang dijatuhi pidana penjara diantaranya adalah narapidana kurungan mempunyai hak perbaikan nasib dengan ongkos sendiri atau hak pistole Pasal 23 KUHP. Perbaikan itu misalnya : mengenai makanan dan tempat tidur. Sedangkan

candu, minuman keras, anggur, dan bir hanya dapat diberikan bila dianggap perlu oleh dokter penjara.⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pengemis di Muka Umum

Dalam buku Standar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, ada berapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis :⁹

- a. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
- b. Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
- c. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh peraturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk menjadi pengemis, diantaranya adalah :

1. Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi yang kurang dari kata cukup bahkan minus dihadapkan pada biaya hidup yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga membuat seseorang berpikir untuk mengambil jalan pintas dalam menghasilkan uang.

⁸<http://kalinyaman.blogspot.com/2013/07/pidana-kurungan-dan-pidana-penjara.html>

⁹ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tuna Sosial, *Standar Pelayanan minimum pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*. (Jakarta, Departemen Sosial RI, 2005) Hlm 7-8.

2. Pendidikan

Luasnya pengetahuan menjadi faktor penting dalam persaingan global. Kebanyakan pengemis merupakan orang yang berpendidikan rendah sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk berperan dalam masyarakat secara layak. Disamping itu, seseorang dengan pengetahuan rendah serta hanya ingin berpikir secara *simple* membuatnya terhindar dari kata usaha dan mengambil jalan mudah untuk menghasilkan uang, yaitu mengemis.

3. Ketergantungan

Hal ini murni berasal dari individu masing-masing dimana sifat malas mendominasi dalam pribadinya sehingga ia hanya mampu bergantung pada orang lain.

4. Lingkungan

Ketiga faktor tersebut ditambah dengan faktor lingkungan menjadi penyebab kuat yang menginspirasi seseorang memutuskan untuk menjadi pengemis.¹⁰

Peraturan lain yang mengatur tentang penanganan gelandangan dan pengemis adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007, menurut peraturan ini Polisi mempunyai wewenang dalam melakukan Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Menurut Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP, pengemis di muka umum merupakan tindak pidana ringan. Berdasarkan ketentuan tersebut pengemis dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang hukumannya hanya berupa pidana kurungan. Pengemis di muka umum berpotensi menimbulkan permasalahan sosial, diantaranya :

1. Masalah lingkungan (tata ruang)

Pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti : taman taman, bawah jembatan dan

¹⁰<http://panduvorian.blogspot.com/2014/01/gelandangan-dan-pengemis.html>

pingiran kali. Oleh karena itu keberadaan mereka di kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.

2. Masalah kependudukan

Pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan dan tempat umum pada umumnya tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat. Selain itu sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pendataan kependudukan.

3. Masalah keamanan dan ketertiban

Maraknya pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

4. Masalah kriminalitas

Keberadaan pengemis yang sebagian besar memiliki tingkat ekonomi yang rendah dapat menjadi faktor yang menyebabkan mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Mulai dari pencurian, kekerasan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.¹¹

C. Kebijakan Pidana Terhadap Pengemis di Muka Umum

Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Pasal 504 KUHP

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

¹¹<http://wdy-z.blogspot.com/2013/09/gelandangan-pengemis-anak-jalanan-di.html>

(2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP

(1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

(2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 40 Perda DKI Jakarta 8/2007

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Pelanggaran Pasal 40 huruf a Perda DKI Jakarta 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp30 juta (Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007). Sedangkan, untuk pelanggaran Pasal 40 huruf b dan c Perda DKI 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp20 juta (Pasal 61 ayat (1) Perda DKI 8/2007). Selain itu, dalam upaya menanggulangi gelandangan dan pengemis, pemerintah juga telah menerbitkan PP No. 31 Tahun 1980 tentang

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (“PP 31/1980”). Di dalam PP 31/1980 diatur definisi gelandangan dan pengemis.

D. Urgensi Pengancaman Pidana Kurungan Terhadap Pengemisan di Muka Umum

Dalam rangka mengatasi persoalan gelandangan dan pengemis, ada tiga bentuk usaha yang harus dilakukan, yaitu :

1. Usaha preventif, merupakan usaha untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis. Usaha preventif tersebut dapat dilakukan antara lain dengan :
 - a. Penyuluhan dan bimbingan sosial
 - b. Pembinaan sosial
 - c. Bantuan sosial
 - d. Perluasan kesempatan kerja
 - e. Pemukiman lokal
 - f. Peningkatan derajat kesehatan.
2. Usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan, baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan.
3. Usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui Rumah Singgah dan Panti Sosial.

Oleh karena itulah diperlukan adanya suatu produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dapat berlaku dengan efektif yang dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai pembinaan gelandangan dan pengemis. Ketentuan baku tersebut meliputi :

1. Mengembangkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anak yang berada di jalan gelandangan dan pengemis baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, dengan mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaan mereka di jalanan terhadap masyarakat lainnya, sehingga masyarakat kembali menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pemberdayaan untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia
2. Memetakan identitas, asal usul gelandangan dan pengemis guna dijadikan dasar pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial
3. Mengklasifikasikan kriteria pembinaan gelandangan dan pengemis
4. Membangun persepsi yang sama dalam melakukan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis dan pengamen oleh berbagai pihak baik dari pemerintah, masyarakat, keluarga maupun perorangan
5. Mengupayakan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana agar gelandangan, pengemis dan pengamen mendapatkan pendampingan secara kuantitas maupun kualitas; dan
6. Membangun sinergi antar dinas terkait maupun dengan lembaga-lembaga sosial, termasuk perguruan tinggi agar terbentuk jaringan yang komprehensif dalam rangka melakukan pembinaan terhadap gelandangan, dan pengemis.

Penanggulangan pengemisan di muka umum bertujuan untuk mengurangi terjadinya pengemisan, serta mencegah pengaruh buruk akibat pengemisan dalam masyarakat.

Memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para pengemis untuk memiliki kembali keterampilan dan kemampuan untuk mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia. Oleh sebab itu pengancaman pidana terhadap pengemis perlu diterapkan, untuk mencegah dan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela dan tidak boleh dilakukan.



BAB III

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan pada penelitian hukum ini, yaitu :

Urgensi pengancaman pidana kurungan terhadap pengemisan dimuka umum adalah untuk mencegah dan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela dan tidak boleh dilakukan. Hal ini bertujuan agar terciptanya kenyamanan, ketertiban dan keamanan kota, karena keberadaan pengemis itu secara langsung sangat mengganggu ketertiban umum ataupun ketertiban lalu lintas sehingga membuat banyak masyarakat lainnya menjadi tidak nyaman. Tetapi didalam menanggulangi maraknya pengemisan di muka umum, dapat dikatakan sedikit sekali urgensi pengancaman pidana kurungan terhadap pengemis karena masih banyak lagi pengemisan yang masih ada di jalan-jalan atau di muka umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 2005. *Standar Pelayanan Minimum Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Departemen Sosial RI, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1998. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Karya Nusantara, Bandung.

Website:

<http://dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html>.

<http://kamusbahasaIndonesia.org/urgensi#ixzz2n0mHVoEg>

<http://penelitihukum.org/tag/definisi-di-muka-umum/>

<http://kalinyaman.blogspot.com/2013/07/pidana-kurungan-dan-pidana-penjara.html>